PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BAGI PENGHUNI APARTEMEN SINGGAH

Hery Wibowo, Rudi S. Darwis, dan Ishartono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran E-mail: hery.wibowo@unpad.ac.id; 2rsdarwis@gmail.com3kesosish@gmail.com

ABSTRAK. Penghuni apartemen singgah milik Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bukanlah penguhi tetap. Mereka tinggal sementara untuk selanjutnya diharapkan mampu untuk memiliki rumah sendiri di luar apartemen singgah. Sehingga, masa tinggal di apartemen singgah sesungguhnya adalah masa untuk mengembangkan kapasitas diri dan menyiapkan finansial agar dapat memiliki rumah tinggal sendiri. Dinamika sosial dan pola interaksi antara warga di apartemen singgah dapat menjadi sebuah tantangan dan hambatan. Namun, dengan perspektif yang berbeda, kondisi ini dapat menjadi potensi kolektif bagi warga untuk pengembangan kapasistas. Upaya membangun sikap dan keterampilan kewirausahaan sosial, diharapkan dapat menjadi solusi bagi peningkatkan keterampilan kewirausahaan keluarga dan kualitas hidup warga.

Kata kunci: kewirausahaan sosial, pemberdayaan, perumahan

ABSTRACT. The inhabitants of the stopover apartment belonging to West Java Human Settlement and Housing Agency is not a permanent fulfillment. They stay temporarily for the next expected to be able to have their own home outside the apartment stopover. Actually, while living in stopover apartment the citizens will have time to develop self-capacity and saving in order to have a future home of their own. The social dynamics and patterns of interaction between citizens in stopover apartments can be a challenge and an obstacle. However, with different perspectives, this condition can be a collective potential for citizens to develop capacities. Efforts to build attitudes and skills of social entrepreneurship, is expected to be a solution for improving family entrepreneurship skills and quality of life of citizens.

Key words: social entrepreneurship, empowerment, housing

PENDAHULUAN

Salah satu wujud terciptanya masyarakat sejahtera adalah meningkatkan kualitas hidup (Quality of Life). Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat juga memiliki tujuan pada upaya peningkatan kualitas hidup. Dinas ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.

Aktifitas memfasilitasi pembangunan tersebut diantaranya dengan membuat apartemen transit yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (BP3JB). Adapun tujuannya adalah untuk :

- Memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya pekerja industri dengan harga sewa yang terjangkau.
- Menciptakan penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik dan berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan sosial ekonomi masyarakatnya.

Program ini, dihadirkan untuk memberikan kesempatan bagi warga penghuni apartemen singgah untuk menyiapkan dirinya dan keluarganya, baik secara mental, spiritual maupun finansial untuk dapat suatu saat nanti

memiliki tabungan yang cukup untuk membeli rumah tinggal sendiri. Artinya, selama tinggal di apartemen tersebut, warga harus terus bergerak, serta melakukan beragam upaya untuk menyiapkan diri, agar pada saat yang ditentukan nanti telah bersiap untuk pindah ke rumah miliknya sendiri di luar komplek apartemen.

Maka diperlukan sejumlah program peningkatan kapasitas penghuni selama mereka menghuni apartemen singgah ini. Seyoginya program peningkatan kapasitas ini dapat juga memberikan bekal yang cukup bagi warga setelah mereka tinggal di rumah mandiri nanti. Beragam model dan bentuk pembekalan kepada warga dapat diberikan. Peneliti dalam hal ini memilih melakukan pendekatan pendidikan kewirausahaan sosial sebagai payung utama proses pembekalan warga agar mampu meningkatkan pola pikir dan pola aksinya.

Terminologi kewirausahaan sosial dewasa ini semakin mengemukan sebagai salah satu strategi peningkatan ekonomi masyarakat. Kewirausahaan sosial adalah proses inovasi dalam ekonomi yang dapat terjadi dalam konteks kelembagaan yang berbeda, didasarkan pada penciptaan nilai, dan beroperasi menurut peraturan dan logika sendiri (Santos, 2012:350). Secara konseptual, kewirausahaan sosial memiliki perbedaan dengan kewirausahaan bisnis. Kewirausahaan sosial bukan tentang memulai sebuah perusahaan dengan sekelompok teman Anda. Sebagai gantinya, melibatkan individu atau organisasi pribadi yang menjalankan inisiatif untuk mengatasi masalah sosial di komunitas mereka. (Sullivan, Diane M, 2007:77). Artinya, kewirausahaan sosial merupakan dorongan ataupun inisyatif dari anggota

masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan yang mereka mampu. Seiring perkembanganya, kewirausahaan sosial semakin diyakini sebagai salah satu solusi dari beragam permasalahan sosial. Ini adalah pendekatan yang tampaknya cocok untuk mengatasi beberapa masalah paling mendesak di masyarakat modern dan memperbaiki kapitalisme (Santos, 2012:350). Para pelaku praktik kewirausahaan sosial, dikenal sebagai wirausaha sosial. Bagi wirausahawan sosial, misi sosial bersifat eksplisit dan sentral (dees 2001 dalam Gawel, Malin, 2013:1076). Artinya, daya dorong utama praktik kewirausahaan sosial adalah dorong untuk menyelesaikan permasalahan sosial, ataupun mengembangkan potensi sosial. Kewirausahaan sosial kolektif berfungsi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, membangun sumber daya baru dan mempengaruhi pembentukan kembali pengaturan kelembagaan untuk mendukung upaya perubahan yang terukur. (Wren, dkk, 2012:385)

Hubungan antara kewiraswastaan sosial dan filantropi melampaui masalah pendanaan. Salah satu hubungan paling jelas antara kewiraswastaan sosial dan filantropi (selain peserta / penyandang dana) adalah fokus pada menciptakan kesempatan secara sukarela, sejauh nilai budaya dan interaksi sosial yang meluas melampaui tingkat dan unit analisis. Filantropi dan wirausahawan sosial memilih untuk membangun berbagai usaha, dan orang-orang memilih untuk berpartisipasi atau tidak. (Acs, Zoltan J, dkk, 2013:795)

Kewirausahaan sosial, mengejar secara simultan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan oleh usahawan yang giat, dan secara bertahap menemukan tempat di dunia sebagai respon manusia terhadap masalah sosial dan lingkungan. Kapasitas individu dan masyarakat untuk mengatur diri sendiri menjadi kelompok dan asosiasi untuk menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan sudah ada sejak lama, namun kemunculan usaha sosial yang lebih giat yang bertujuan untuk mencapai finansial baru saja menarik perhatian. perhatian para ilmuwan (Nyssens, Marthe, 2007:743).

Wirausaha sosial menggabungkan manfaat ekonomi kewirausahaan dengan penyampaian hasil sosial dan lingkungan, dan berpotensi membantu perkembangan ekonomi dan sosial individu dan masyarakat di seluruh dunia. (Nyssens, Marthe, 2007:743). Pada sejumlah negara, sekumpulan masyarakat, dalam organisasi masyarakat sipil berusaha untuk mempromosikan bentuk asosiasi sukarela (bukan koersif) di luar negara bagian dan sektor swasta, untuk memajukan debat demokratis, dan untuk mencapai tujuan moral dan sosial. (Ridley Rory-Duff, dkk, 2011:35). Artinya praktik kewirausahaan sosial, mulai dilakukan diberbagai sektor dan level masyarakat. Maka melakukan sebuah program untuk mendidik anggota masyarakat menjadi wirausaha sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan komunitas terdekatnya adalah sebuah keniscayaan.

Seiring dengan perkembangan praktiknya, pendidikan kewirausahaan sosialpun semakin mengemuka.

Kewirausahaan sosial terus menjadi bidang minat yang melintasi disiplin akademis dan menantang asumsi tradisional tentang pengembangan ekonomi dan bisnis (Dart, 2004; Leadbeater, 1997). (Dacin, dkk, 2010:37) Banyak wirausahawan sosial fokus pada ruang pendidikan. Filosofi mereka adalah bahwa pendidikan memberi kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik, pengalaman konsumsi yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan mereka. (Bloom, Paul N, 2009:130). Prinsipnya, semakin mengemuka semangat untuk menularkan semangat dan kebaikan dari kewirausahaan sosial melalui pendidikan kewirausahaan sosial.

METODE

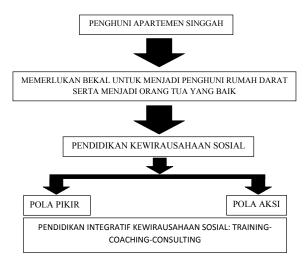
Payung teori yang menaungi praktik ini adalah pemberdayaan masyarakat. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lembah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil vang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2010).

Melalui semangat pemberdayaan, yaitu mendorong warga untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensinya, maka diaplikasikan skema pendidikan kewirausahaan sosial. Pendidikan kewirausahaan sosial dalam hal ini merupakan program pengembangan pribadi, pengembangan pola pikir positif dan apresiatif serta pengembangan keterampilan manajerial kewirausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama program pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan satu praktik pelatihan pengembangan diri (perubahan pola pikir dan penanaman sikap positif) dan juga praktik pengolahan sampah anorganik. Selanjutnya, direncanakan akan dilakukan kembali serangkaian pelatihan dalam payung pendidikan kewirausahaan sosial.

Melalui rancangan program dimuka, direncanakan dibangun sebuah sistem pengembangan kapasitas masyarakat untuk menyiapkan diri memiliki rumah tinggal sendiri di luar apartemen singgah. Penguatan kapasitas kewirausahaan sosial dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pola pikir dan pola aksi. Kedua program ini kemudian didetailkan melalui dua bentuk pelatihan



Gambar 1. Bagan Model Pendidikan Kewirausahaan Sosial



Gambar 2. Bagan Isi progam Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Secara umum pendidikan kewirausahaan sosial merupakan sebuah paket pengembangan diri sekaligus pengembangan keterampilan. Isu pendidikan adalah isu yang tidak lekang oleh waktu, namun harus selalu berkompromi dengan waktu. Keselarasan isi/kurikulum pendidikan dengan kondisi nyata/zaman ataupun tuntutan kehidupan adalah kunci utama terhasilkannya luaran pendidikan yang baik.

Salah satu diantara banyak sekali amanah pendidikan pada era sekarang ini adalah pendidikan yang mampu menghasilkan luaran yang bukan hanya mandiri secara ekonomi, namun juga sekaligus menjadi konseptor optimasi sumber daya yang ada, agen pemberdaya masyarakat dan aktor penggerak eknomi.

Maka salah satu jalan keluarnya, memberikan suntikan bahan baru terhadap model pendidikan pada masyarakat. Hal yang diangkat suntikan program peningkatan keterampilan inovasi sosial dan kemampuan membangun kewirausahaan sosial. Adapun, *roadmap*nya dimulai dari penumbuhkembangan kepekaan sosial, inovasi sosial dan pada ujungnya kewirausahaan sosial.

Upaya menumbuhkan keterampilan inovasi sosial, secara umum, dimulai dari penumbuhan "empati atau jiwa' sosial. Peserta didik, dapat secara berkesinambungan didekatkan dengan akar kondisi sosial masyarakat. Ragam studi kasus dapat diberikan untuk mendorong peserta didik mengasah sisi terdalam dari simpati sosialnya. Berbagai bentuk simulasi yang bertujuan untuk mengumpulkan 'bank' pemahaman peserta didik terhadap permasalahan sosial, dapat selalu diprogramkan.

Kepekaan kewirausahaan sosial, menjadi penting untuk ditumbuhkan mengingat Indonesia secara umum membutuhkan para pemikir/konseptor bersama/kolektif untuk beragam penyelesaian masalah bangsa. Jika 'rasa' ini ditanamkan sejak dini, maka secara umum dapat diharapkan bahwa ide/gagasan atau bahkan praktik/gerakan penyelesaian masalah sosial, dapat muncul dari mana saja dan kapan saja dari masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan, semakin lama akan semakin mengakar dan mendarah daging. Maka, kebangkitan nasional, salah satu serpihannya adalah mulai bangkinya 'rasa' kepekaan sosial dikalangan generasi muda.

Selanjutnya,upaya membangun pola pikir kreatif, out of the box, berpikir di luar keumuman (unreasonable thinking) dan sebagainya. Ini adalah pola pembelajaran yang anti mainstream. Peserta didik, didorong untuk berpikir seluas dan seliar mungkin, dalam koridor pembelajaran yang 'bebas'dan terarah. Simulasi pembelajaran, diharapkan mampu mendorong setiap siswa mengeluarkan ide/gagasan/usulan yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan absurd sekalipun. Para pendidik kemudian bertindak sebagai fasilitator untuk meluruskan, merangkum dan membumikannya.

Fase ini didasari pernyataan bahwa tidak mungkin kita dapat menyelesaikan masalah yang berbeda serta semakin rumit dan kompleks dengan cara yang sama. Maka keterampilan berinovasi sosial dan bersolusi kreatif menjadi hal yang wajib dimiliki setiap warga masyarakat.

Kewirausahaan, sebagai kata kunci pengembangan bangsa (Mclelland) adalah harga mati yang tidak bisa di tawar. Ciputra (2016) menyebutnya sebagai aksi yang dapat mempengaruhi masa depan individu dan masa depan bangsa. Maka pendidikan kewirausahaan sosial, akan melengkapi pola pikir tersebut. Terminologi sosial, menyiratkan bahwa setiap usaha yang dilengkapi dengan strategi keseimbangan. Pemikiran klasik, berbisnis untuk menghasilkan dana pribadi sebesarbesarnya sudah jauh ditinggalkan. Saat ini, berbisnis adalah dengan berbagi ekonomi dan sumber daya. Berbisnis adalah untuk saya, kami dan kita semua. Berbisnis adalah membangun maslahat, untuk sebanyak mungkin pemegang kepentingan.

Melalui platform kewirausahan sosial, pendidikan bisnis tidak akan hanya menghasilkan calon pengusaha rakus/tamak yang menghalalkan segala cara, namun justru membangun empati sosial bahwa setiap bentuk usaha apapun, punya potensi untuk menyelesaikan satu atau beragam jenis masalah sosial. Setiap satu keuntungan dari usaha yang halal, merupakan potensi senyum dan berkah bagi pihak yang membutuhkan.

Model pendidikan kewirausahaan sosial, seyogianya akan dapat memberikan keseimbangan pola pikir siswa, yaitu membangun usaha sekaligus beramal dan berbisnis sekaligus membantu pemerintah menuntaskan ragam permasalahan sosial bangsa. Maka kebangkian nasional, dapat dimaknasi sebagai kebangkian pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan empati sosial tinggi, mampu berinovasi sosial serta cakap dalam memandirikan usahanya dalam kerangka kewirausahaan sosial.

SIMPULAN

Pendidikan kewirausahaan yang direncanakan diberikan merupakan sebuah paket lengkap bagi penyiapan mental, spiritual sekaligus finansial bagi penghuni rusunawa. Melalui keikutsertaan aktif warga, diharapkan terbangun iklim yang positif dan kondusif bagi seluruh warga untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Sehingga upaya untuk meningkatkan kapasitas diri, dalam rangka menyiapkan tabungan terbaik bagi fase kehidupan selanjutnya, dapat dilakukan secara bersama (kolektif).

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Zoltan J, Boardman, Mary C, and McNeely, Connie L. 2013, *The social value of productive entrepreneurship*, Source: Small Business Economics, Vol.40, No. 3 (April 2013), pp. 785-796. Published by: Springer, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/23360623.
- Bloom, Paul N, 2009, Overcoming Consumption
 Constrainints Through Social Entrepreneurship,
 Source: Journal of Public Policy & Marketing
 , Vol. 28, No. 1, Consumption Constrainints
 (SPIRING 2009), pp. 128-134, Published
 by: American Marketing Association, Stable
 URL:http://www.jstor.org/stable/25651615
- Dacin Peter A, Dacin Tina, and Matear Margaret, 2010, Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward Form Here, Source: Academy of Management Perspectives, vol. 24, No. 3 (August 2010), pp. 37-57, Published by: Academy of Management, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/29764973
- Gawel, Malin, 2013, Social Entrepreneurship: Action Grounded in Need, Opportunities and/or Perceived Necessities. Source: Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 24,

- No. 4 (December 2013), pp. 1071-1090, Published by: Springer, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/42629856.
- Kasali, Renald. 2017. *Disruption*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nyssens, Marthe, 2007, New Strategies for a Sustainable Society: The Growing Contribution of Social Entrepreneurship, Souce: Business Ethics Quarterly, Vol. 17, No. 4 (Oct, 2007), pp 743-749), Published by: Cambridge University Press, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/27673208.
- Ridley Rory-Duff, and Bull Mike, 2011, *Understanding Social Entreprice*, Theory & practice, *London*:Sage
- Santos, Filipe M, 2012, *A Positive Theory of Social Entrepreneurship*, Source: Journal of Business *Ethics*, Vol. 111, No. 3, Social Entrepreneurship in Theory and Practice (December 2012), pp. 335-351. Published by: Springer, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/233256742.
- Suharto, Edi. 2010. *CSR dan COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung. *Penerbit* Alfabeta.
- Sullivan, Diane M, 2007. Stimulating Social Entrepreneurship: Can Support from Cities Make a Difference? Source: Academy of Management Perspectives, Vol. 21, No. 1 (Feb, 2007), pp. 77-78, Published by: Academy of Management, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/4166292.
- Tanimito, kanji, 2008, *A Conceptual Framework of Social Entrepeneurship and Social Innovation Cluster*, Source: Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, Vol.42, No. 1 (42) (October 2008), pp. 1-16. Published by: Hitotsubashi University, Stable URL:http://www.jstor.org/stable/43295012.
- Wren, Montgomery. A, Dacin, Peter A, and Tina Dacin. A, 2012. Collective Social Entrepreneurship: Collaboratively Shaping Social Good, Source: Journal of Business Ethics, Vol. 111, No. 3, Social Entrepreneurship in Theory and Practice, pp. 375-388. Published by: Springer, Stable URL:http:// www.jstor.org/stable/23325674